



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 88 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-3/PK.3.5/2014, tanggal 4 November 2014 hal Realisasi Penyetoran Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 910/4552, tanggal 19 November 2014 hal Permohonan Tambahan Anggaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Trans Jogja, sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, sesuai ketentuan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT Jogja Tugu Trans, maka perlu adanya penyesuaian belanja Biaya Pokok Biaya Operasional Kendaraan (BOK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 46.1);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 32);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 59);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 51);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 78), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a). Semula	Rp.3.073.211.128.106,27
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 81.373.366.076,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 3.154.584.494.182,27</u>

2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung

a). Semula	Rp. 1.582.563.906.699,77
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 80.210.201.023,33</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 1.662.774.107.723,10</u>

- b. Belanja Langsung

- 1) Pegawai

a). Semula	Rp. 119.273.305.603,00
b). Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah	<u>Rp. 119.273.305.603,00</u>

Perubahan

- 2) Belanja Barang dan Jasa

a). Semula	Rp. 1.098.554.199.807,00
b). Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.163.165.052,67</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp. 1.099.717.364.859,67

Perubahan

3) Belanja Modal	
a). Semula	Rp. 583.804.239.084,00
b). Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<u>Rp. 583.804.239.084,00</u>

### 3. Pembiayaan

a). Penerimaan	
1) Semula	Rp. 382.020.096.897,50
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 382.020.096.897,50</u>
b). Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 71.035.573.810,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 71.035.573.810,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 310.984.523.087,50</u>
<u>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun</u> Berkenaan	<u>Rp. 0,00</u>

2. Ketentuan Pasal 2 berubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Nopember 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 90

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.09. - P P K D / B U D

Halaman : 5

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	4	4	5	6	7
1.20.1.20.09.00.00.4.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.812.294.018.602,00</b>	<b>1.812.294.018.602,00</b>	-	<b>0,00</b>	
	Jumlah Pendapatan	1.812.294.018.602,00	1.812.294.018.602,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>1.059.297.963.062,77</b>	<b>1.139.465.846.695,85</b>	<b>80.167.883.633,08</b>	<b>7,57</b>	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.059.297.963.062,77</b>	<b>1.139.465.846.695,85</b>	<b>80.167.883.633,08</b>	<b>7,57</b>	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	490.980.812.993,00	490.980.812.993,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	14.631.602.000,00	14.631.602.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	416.385.151.220,66	472.309.827.352,47	55.924.676.131,81	13,43	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/ Kota	416.385.151.220,66	472.309.827.352,47	55.924.676.131,81	13,43	<b>472.309.827.352,47</b>
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	87.671.565.394,81	95.415.455.298,78	7.743.889.903,97	8,83	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta 95.415.455.298,78
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	85.077.751.684,48	98.768.112.401,54	13.690.360.717,06	16,09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul 98.768.112.401,54
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	45.064.756.844,15	52.800.817.293,47	7.736.060.449,32	17,17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo 52.800.817.293,47
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul	49.275.600.235,88	60.256.969.641,12	10.981.369.405,24	22,29	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul 60.256.969.641,12
1.20.1.20.09.00.00.5.1.6.02.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	149.295.477.061,34	165.068.472.717,56	15.772.995.656,22	10,56	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman 165.068.472.717,56
1.20.1.20.09.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	130.851.204.562,00	130.851.204.562,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	6.449.192.287,11	30.692.399.788,38	24.243.207.501,27	375,91	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	6.449.192.287,11	30.692.399.788,38	24.243.207.501,27	375,91	<b>30.692.399.788,38</b>
1.20.1.20.09.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga...	6.449.192.287,11	30.692.399.788,38	24.243.207.501,27	375,91	Belanja Tidak Terduga... 30.692.399.788,38
1.20.1.20.09.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	
	Jumlah Belanja	1.059.297.963.062,77	1.139.465.846.695,85	80.167.883.633,08	7,57	
	Surplus/(Defisit)	752.996.055.539,23	672.828.171.906,15	(80.167.883.633,08)	-10,65	

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
 NIP. 19640714 199102 1 001